MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

TINJAUAN EKONOMI SYARIAH TERHADAP KESULITAN BELANJA AKIBAT TIDAK ADANYA ALFAMART DAN INDOMARET DI KECAMATAN MERSAM

Umi Farhana[1*], Elyanti Rosmanidar[2]
Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi, Indonesia
Email: umifarhana2411@gmail.com

Abstract

The abstract provides a concise summary of the study, including its objectives, methods, key findings, and implications. This research aims to analyze the shopping difficulties experienced by the community in Mersam District due to the absence of modern retail outlets such as Alfamart and Indomaret from an Islamic economic perspective. The scope of the study focuses on limited access to essential goods, price instability, and the impact on community economic well-being. The research employs a qualitative descriptive method through field observations, informal interviews, and literature reviews related to Islamic economic principles, particularly justice, public interest (maslahah), and fair distribution. The findings indicate that the lack of modern retail stores forces residents to incur higher transportation costs, face limited product choices, and experience price fluctuations in traditional shops. However, this condition also creates opportunities to strengthen local micro-enterprises aligned with sharia principles. The study concludes that ensuring fair and affordable shopping access requires empowering local merchants, increasing price transparency, and strengthening goods distribution to support community welfare.

Keywords: Islamic Economics, Shopping Access, Modern Retail.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesulitan belanja yang dialami masyarakat Kecamatan Mersam akibat tidak adanya gerai ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret dalam perspektif ekonomi syariah. Batasan penelitian difokuskan pada keterbatasan akses barang kebutuhan pokok, ketidakstabilan harga, serta dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui observasi lapangan, wawancara informal, dan studi literatur terkait prinsip ekonomi syariah, terutama mengenai

Article history
Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagiarism checker no 80
Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : Musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

keadilan, kemaslahatan, dan distribusi yang merata. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketiadaan ritel modern menyebabkan masyarakat mengeluarkan biaya transportasi lebih tinggi, memiliki pilihan barang yang terbatas, dan menghadapi fluktuasi harga dari toko tradisional. Namun, kondisi tersebut juga menciptakan peluang penguatan usaha mikro lokal yang dapat dikembangkan sesuai prinsip syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyediaan akses belanja yang adil dan terjangkau perlu didukung melalui pemberdayaan pedagang lokal, transparansi harga, serta penguatan distribusi barang yang berpihak pada kemaslahatan masyarakat.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Akses Belanja, Ritel Modern.

PENDAHULUAN

Ketersediaan infrastruktur ritel modern merupakan indikator penting dalam menilai efisiensi dan stabilitas pasar di suatu wilayah. Di banyak kawasan perkotaan di Indonesia, kehadiran gerai ritel waralaba seperti Alfamart dan Indomaret telah menjadi standar baru bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, menawarkan kemudahan akses, variasi produk yang luas, dan harga yang relatif terjangkau. Namun, disparitas akses terhadap fasilitas modern ini masih menjadi tantangan di daerah tertentu. Kecamatan Mersam, misalnya, merupakan salah satu wilayah yang hingga saat ini belum memiliki akses terhadap gerai ritel modern tersebut. Kondisi ini secara langsung menimbulkan kesulitan belanja yang signifikan bagi masyarakat lokal, terutama yang berkaitan dengan keterjangkauan harga, ketersediaan barang, dan aksesibilitas yang terbatas, sehingga mengharuskan masyarakat untuk bergantung sepenuhnya pada warung tradisional dan pasar lokal yang mungkin memiliki keterbatasan dalam skala dan manajemen distribusi.

Ketiadaan ritel modern tidak hanya berdampak pada aspek kenyamanan, tetapi juga menyentuh isu inti sosial-ekonomi masyarakat. Kesulitan belanja yang dialami warga Mersam meliputi tingginya biaya logistik untuk mendapatkan barang-barang tertentu, kurangnya pilihan produk, dan potensi fluktuasi harga yang kurang stabil dibandingkan dengan harga standar waralaba nasional. Dalam konteks pemenuhan kebutuhan dasar (*dharuriyyat*) dan kebutuhan sekunder (*hajiyyat*), situasi ini dapat mengancam kesejahteraan (*mashlahah*) masyarakat secara keseluruhan (Rahim & Sari, 2021). Oleh karena itu, situasi di Mersam menjadi studi kasus menarik untuk melihat bagaimana struktur pasar yang tidak efisien atau tidak merata dapat mengganggu stabilitas ekonomi rumah tangga dan menuntut analisis mendalam mengenai pemenuhan hak konsumen atas akses barang yang wajar.

Isu kesulitan belanja ini harus dianalisis dari perspektif yang lebih mendasar, yaitu Ekonomi Syariah. Prinsip fundamental dalam Ekonomi Syariah menekankan pada keadilan distribusi (*al-Adl*) dan pencapaian kemaslahatan (*mashlahah*) umat. Keadilan dalam pasar tidak hanya berarti tidak adanya praktik penimbunan (*ihtikar*) atau penipuan, tetapi juga mencakup

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

keseimbangan antara kepentingan produsen, pedagang, dan konsumen. Kesulitan yang dihadapi konsumen Mersam mengindikasikan adanya ketidakseimbangan atau inefisiensi dalam mekanisme pasar lokal, yang memerlukan intervensi kebijakan yang berlandaskan moral dan etika Islam (Hasan & Ismail, 2022). Oleh karena itu, tinjauan Ekonomi Syariah penting untuk menilai apakah struktur pasar yang ada telah optimal dalam menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

Berdasarkan konteks permasalahan tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis kesulitan belanja yang dialami masyarakat Kecamatan Mersam dari sudut pandang Ekonomi Syariah. Secara spesifik, penelitian ini akan mengkaji dampak ketiadaan gerai ritel modern terhadap prinsip keadilan distribusi dan pencapaian kemaslahatan masyarakat. Pembahasan akan diawali dengan landasan teoritis mengenai konsep pasar dan *mashlahah* dalam Ekonomi Syariah, dilanjutkan dengan analisis empiris kondisi pasar di Mersam. Selanjutnya, akan diusulkan alternatif solusi atau rekomendasi kebijakan yang selaras dengan nilai-nilai Syariah.

Fenomena penetrasi ritel modern di Indonesia, khususnya gerai waralaba seperti Alfamart dan Indomaret, telah mengubah lanskap distribusi barang dan jasa, memberikan aksesibilitas serta kepastian harga bagi konsumen. Namun, keberadaan fasilitas ini masih belum merata, menciptakan kesenjangan akses yang signifikan di beberapa wilayah. Kecamatan Mersam merupakan salah satu daerah yang menghadapi kondisi tersebut, di mana ketiadaan gerai ritel modern menimbulkan kesulitan belanja bagi masyarakat. Kesulitan ini berpusat pada tiga aspek utama: keterjangkauan harga yang tidak terstandarisasi, ketersediaan barang yang terbatas, dan aksesibilitas yang rendah karena ketergantungan pada rantai pasok tradisional. Situasi ini menjadi isu krusial karena akses pasar yang efisien dan stabil adalah prasyarat dasar bagi pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.

Kondisi kesulitan belanja di Mersam ini tidak hanya dapat ditinjau dari perspektif ekonomi konvensional mengenai persaingan dan efisiensi, tetapi secara mendalam juga menuntut analisis berdasarkan kerangka Ekonomi Syariah. Ekonomi Syariah mengatur mekanisme distribusi barang dan jasa berdasarkan prinsip-prinsip luhur, yaitu keadilan (*'adl*), pencapaian kemaslahatan (*mashlahah*), dan keterhindaran dari eksploitasi (*ghishsh*, *ghishshul-qiimah*, dsb.). Prinsip ini memastikan bahwa kegiatan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan spiritual dan material masyarakat. Kesulitan yang dialami masyarakat Mersam, terutama terkait harga dan akses, dapat dianggap sebagai hambatan dalam mencapai *mashlahah* (Siregar & Lubis, 2024), yaitu terpenuhinya kebutuhan hidup yang membawa manfaat.

Oleh karena itu, ketidakhadiran ritel modern dapat dianalisis menggunakan teori distribusi syariah, pasar yang adil, serta konsep kesejahteraan masyarakat. Teori tentang pasar syariah mensyaratkan mekanisme harga yang terbentuk harus bebas dari unsur zalim dan manipulasi, serta memastikan adanya persaingan yang sehat (*Al-Adl*) dalam sistem distribusi. Apabila pasar lokal mengalami inefisiensi yang menyebabkan harga menjadi terlalu tinggi atau pasokan menjadi langka, hal itu bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi Islam (Aziz &

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Hidayat, 2023). Lebih lanjut, tinjauan ini akan memanfaatkan perspektif fiqh muamalah untuk mendasari pembahasan mengenai peran pedagang lokal dan tanggung jawab kolektif dalam menjamin ketersediaan barang.

Berdasarkan relevansi teoretis dan urgensi isu lokal, artikel ini bertujuan untuk memberikan tinjauan Ekonomi Syariah yang komprehensif terhadap kesulitan belanja akibat ketiadaan ritel modern di Kecamatan Mersam. Analisis akan difokuskan pada sejauh mana struktur pasar saat ini telah memenuhi prinsip *'adl* dan *mashlahah*, serta mengidentifikasi potensi solusi alternatif berbasis syariah, seperti penguatan koperasi atau pemberdayaan *halqah* (rantai) distribusi lokal. Secara sistematis, pembahasan ini akan menguraikan konsep pasar syariah, dilanjutkan dengan analisis kasus Mersam, dan diakhiri dengan rekomendasi strategis.

Penelitian-penelitian terdahulu yang berfokus pada dinamika ritel dan pasar telah menunjukkan korelasi signifikan antara akses terhadap ritel modern dan stabilitas ekonomi mikro. Akses ritel modern terbukti berpengaruh pada stabilitas harga, pemerataan distribusi barang, dan peningkatan efisiensi belanja masyarakat secara keseluruhan. Sebagai contoh, hasil studi oleh Mustofa dan Huda (2021) menggarisbawahi bahwa di daerah dengan penetrasi ritel yang tinggi, variasi harga antarproduk lebih sempit dan inflasi lokal cenderung lebih terkendali karena efisiensi rantai pasok. Namun, studi lain yang menyoroti daerah tanpa infrastruktur ritel modern, seperti yang dihadapi Kecamatan Mersam, menemukan bahwa wilayah-wilayah tersebut rentan terhadap fluktuasi harga yang tinggi dan ketergantungan berlebihan pada toko atau warung kecil yang mungkin tidak memiliki kekuatan tawar (*bargaining power*) yang memadai terhadap distributor besar. Kesenjangan ini menimbulkan dilema keadilan dalam distribusi kekayaan dan akses barang, yang sangat relevan dengan prinsip *'adl* dalam Ekonomi Syariah.

Menanggapi tantangan pasar yang tidak efisien di daerah terpencil, beberapa praktik terbaik (*best practices*) dari daerah lain menunjukkan bahwa penguatan pasar lokal berbasis syariah dapat menjadi solusi efektif dalam menjamin ketersediaan barang dan harga yang adil. Model alternatif yang berhasil diimplementasikan sering melibatkan penguatan kelembagaan berbasis komunitas (misalnya Koperasi Syariah atau Badan Usaha Milik Desa Syariah) yang mengambil peran sebagai distributor kolektif. Model ini bertujuan memotong rantai distribusi yang panjang, sehingga dapat menurunkan harga jual bagi konsumen akhir dan meningkatkan daya saing warung lokal. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2022) menyimpulkan bahwa melalui model distribusi kolektif syariah, prinsip *mashlahah* (kesejahteraan) dapat tercapai karena adanya transparansi harga dan manajemen yang berorientasi pada kepentingan bersama, bukan sekadar profit individu, sehingga dapat dijadikan acuan konseptual untuk mengatasi kesulitan belanja di Mersam.

Meskipun prinsip-prinsip Ekonomi Syariah menyediakan landasan normatif untuk pasar yang adil, implementasinya di lapangan menghadapi serangkaian tantangan struktural di Kecamatan Mersam. Tantangan utama berakar pada keterbatasan infrastruktur distribusi

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

barang, di mana rantai pasok yang panjang dan tidak efisien menyebabkan biaya tinggi dan kerentanan terhadap gejolak. Selain itu, minimnya persaingan pasar akibat tidak adanya *mini-market* waralaba sering kali membuat harga menjadi tidak terkendali dan kurang kompetitif dibandingkan harga ritel nasional. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan modal pedagang lokal, yang mengakibatkan variasi barang yang sangat minim dan sulit memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh (Purnomo & Abdullah, 2022). Keseluruhan masalah ini mengindikasikan adanya kegagalan pasar yang memerlukan intervensi. Namun, sejauh ini terlihat adanya kurangnya intervensi pemerintah daerah yang terstruktur dalam penyediaan akses ritel yang merata dan berkeadilan, baik melalui regulasi maupun melalui pemberdayaan kelembagaan ekonomi lokal.

Melihat urgensi masalah dan kompleksitas tantangan di atas, timbulah kesenjangan penelitian yang signifikan. Meskipun banyak studi mengulas dampak ritel modern secara umum, belum banyak kajian yang mengkaji fenomena ketiadaan ritel modern dari perspektif Ekonomi Syariah secara spesifik dan mendalam. Kajian konvensional cenderung berfokus pada efisiensi kapital, sementara tinjauan Syariah akan menimbang aspek moralitas dan tujuan *maqasid syariah* (Zulfa & Ghafar, 2023). Secara khusus, belum ada analisis mendalam mengenai bagaimana kondisi ini memengaruhi keadilan distribusi (*'adl*) dan kesejahteraan (*mashlahah*) masyarakat Mersam dari kacamata *fiqh muamalah*. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk secara sistematis mengisi celah tersebut dengan menyediakan kerangka analisis berbasis syariah, dan pada akhirnya menawarkan solusi praktis yang berakar pada prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan umat.

Berdasarkan latar belakang masalah, tinjauan literatur, dan kesenjangan penelitian yang telah diidentifikasi, penelitian ini memiliki tiga arah utama yang terstruktur. Pertama, penelitian akan secara mendalam mengkaji bentuk kesulitan belanja yang dialami oleh masyarakat Kecamatan Mersam, mengidentifikasi dimensi masalah yang paling krusial—mulai dari ketersediaan, keterjangkauan harga, hingga aspek aksesibilitas. Kedua, temuan empiris tersebut akan dianalisis menggunakan kerangka teori Ekonomi Syariah, berfokus pada seberapa jauh kondisi pasar saat ini telah memenuhi prinsip keadilan distributif (*'adl*) dan mencapai kesejahteraan publik (*mashlahah*). Dengan menggabungkan analisis *fiqh muamalah* dan *maqasid syariah*, kajian ini bertujuan memberikan penilaian normatif terhadap struktur pasar lokal. Ketiga dan terakhir, berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian ini akan memberikan rekomendasi strategis berbasis syariah yang konstruktif, dengan tujuan untuk meningkatkan akses belanja yang lebih adil dan maslahat, misalnya melalui model Koperasi Syariah atau pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penyedia logistik utama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain Studi Literatur (Studi Kepustakaan). Studi literatur dipilih karena fokus utama penelitian adalah melakukan tinjauan dan analisis konseptual-normatif terhadap isu kesulitan belanja di Kecamatan Mersam dari

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

perspektif Ekonomi Syariah. Dengan metode ini, peneliti akan mengumpulkan, membaca, menganalisis, dan mensintesis data sekunder yang relevan dari berbagai sumber akademis dan otoritatif. Desain ini memungkinkan peneliti untuk membangun kerangka konseptual yang kuat, meninjau ulang teori-teori Ekonomi Syariah yang sudah ada, dan mengaplikasikannya sebagai pisau analisis terhadap isu kontemporer yang spesifik di daerah kajian.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis dan konseptual. Pendekatan normatif-yuridis diterapkan untuk menganalisis hukum-hukum dan prinsip-prinsip dasar yang bersumber dari *fiqh muamalah* dan *maqasid syariah* terkait mekanisme pasar, distribusi, dan kesejahteraan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep-konsep inti Ekonomi Syariah seperti *al-adl* (keadilan), *mashlahah* (kemaslahatan), dan etika berdagang. Kedua pendekatan ini dikombinasikan untuk memastikan bahwa analisis terhadap fenomena ketiadaan ritel modern memiliki landasan teologis dan teoretis yang kuat, sekaligus relevan dengan konteks sosio-ekonomi lokal di Mersam.

Sumber data dalam penelitian studi literatur ini diklasifikasikan menjadi dua kategori utama. Data Primer dalam konteks normatif meliputi teks-teks Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan distribusi dan keadilan dalam pasar, serta literatur klasik (*kutub al-turath*) dalam bidang *fiqh muamalah*. Sementara itu, Data Sekunder mencakup literatur akademik kontemporer berupa jurnal ilmiah (seperti yang dikutip dari Aziz & Hidayat, 2023; Setiawan, 2022), buku-buku referensi Ekonomi Syariah, serta prosiding seminar yang membahas distribusi, ritel, dan pembangunan ekonomi daerah. Data sekunder ini diperkaya dengan laporan resmi, kebijakan pemerintah daerah (jika ada), dan data statistik yang relevan mengenai Kecamatan Mersam.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan penelusuran literatur sistematis (*Systematic Literature Review/SLR*). Teknik dokumentasi melibatkan pencatatan sistematis terhadap informasi penting, definisi konsep, dan dalil-dalil hukum yang relevan. Proses SLR dilakukan dengan menetapkan kata kunci yang berkaitan dengan fokus penelitian (*ritel modern*, *distribusi syariah*, *mashlahah*, *keadilan pasar*) pada basis data jurnal terkemuka. Setiap dokumen yang terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan relevansi topik dan kredibilitas penulis, memastikan bahwa semua data yang digunakan adalah valid dan mendukung argumentasi utama penelitian.

Lingkup kajian ini dibatasi pada perbandingan antara kondisi aktual distribusi barang di Kecamatan Mersam (yang dicirikan oleh keterbatasan akses dan fluktuasi harga) dengan prinsip-prinsip ideal distribusi dalam Ekonomi Syariah. Fokus utama adalah menganalisis dampak kesulitan belanja terhadap dimensi *mashlahah* masyarakat, terutama dalam kategori *hajiyyat* (kebutuhan sekunder yang meningkatkan kenyamanan). Selain itu, kajian ini memfokuskan analisis pada upaya menemukan model *best practice* (seperti model koperasi syariah yang disebutkan oleh Setiawan, 2022) yang dapat diterapkan sebagai solusi *fiqh muamalah* untuk mengatasi inefisiensi pasar lokal.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Data yang telah dikumpulkan dan diklasifikasikan akan dianalisis menggunakan Analisis Isi Kualitatif (*Qualitative Content Analysis*) dan Analisis Deskriptif-Komparatif. Analisis Isi dilakukan untuk menafsirkan dan mengategorikan informasi dari sumber-sumber hukum Syariah dan literatur akademik. Analisis Deskriptif digunakan untuk menguraikan kondisi kesulitan belanja di Mersam, sementara Analisis Komparatif berfungsi membandingkan kondisi riil tersebut dengan standar ideal pasar yang diatur oleh prinsip *al-adl*. Proses ini bersifat deduktif, di mana prinsip umum Syariah diterapkan untuk menelaah kasus spesifik.

Tahap sintesis dan interpretasi merupakan inti dari penelitian ini, di mana peneliti akan merangkai temuan-temuan dari data sekunder menjadi suatu argumentasi yang kohesif. Sintesis dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana ketiadaan ritel modern memengaruhi keadilan distribusi dan kemaslahatan di Mersam. Interpretasi dilakukan dengan menghubungkan fakta-fakta sosial-ekonomi lokal dengan konsep-konsep *maqasid syariah* yang lebih tinggi, sehingga dapat dihasilkan kesimpulan normatif mengenai kelayakan dan keberlanjutan struktur pasar yang ada.

Terakhir, keabsahan hasil penelitian (*trustworthiness*) dijamin melalui Triangulasi Sumber Data dan Klarifikasi Logika. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan pandangan dari berbagai ulama *fiqh* atau akademisi ekonomi Syariah terhadap suatu konsep kunci (misalnya definisi *mashlahah*) untuk mencapai kesimpulan yang paling otoritatif. Klarifikasi Logika memastikan bahwa seluruh langkah analisis (dari prinsip Syariah hingga rekomendasi solusi) dilakukan secara logis, konsisten, dan transparan, sehingga temuan yang dihasilkan memiliki dasar ilmiah yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian studi literatur ini berfokus pada analisis konseptual-normatif terhadap kondisi pasar di Kecamatan Mersam, yang ditandai oleh ketiadaan gerai ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret, sehingga menimbulkan kesulitan belanja yang berakar pada ketidakseimbangan struktural. Temuan utama di lapangan menunjukkan bahwa toko-toko kecil lokal menjadi satu-satunya sumber belanja, namun dihadapkan pada keterbatasan stok, minimnya variasi barang, dan ketidakstabilan harga kebutuhan pokok yang bervariasi antar toko. Kondisi ini diperparah oleh inefisiensi distribusi yang didorong oleh keterbatasan infrastruktur dan modal pedagang, yang memaksa rantai pasok menjadi lebih panjang dan berbiaya tinggi. Sebagai dampaknya, sebagian masyarakat harus pergi ke kecamatan atau kota lain untuk memenuhi kebutuhan belanja, yang menambah biaya transportasi dan waktu. Kondisi riil ini dianalisis dengan kerangka Ekonomi Syariah untuk mengukur tingkat kesenjangan dalam pencapaian *'adl* dan *mashlahah*.

Secara normatif, temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara realitas pasar Mersam dan tujuan fundamental Ekonomi Syariah, khususnya dalam aspek Mashlahah (kesejahteraan). Keterbatasan variasi barang dan rendahnya aksesibilitas secara nyata mengurangi kualitas hidup dan kenyamanan belanja (*hajiyyat*) masyarakat. Lebih jauh,

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

kesulitan ini paling memukul masyarakat berpenghasilan rendah karena keterbatasan mobilitas dan pengeluaran tambahan untuk biaya transportasi. Ketika pemenuhan kebutuhan sekunder yang meningkatkan kenyamanan terhambat oleh inefisiensi struktural dan biaya yang tidak perlu, hal itu dianggap sebagai hambatan dalam mencapai *mashlahah* yang komprehensif.

Masalah Keadilan (*Al-Adl*) merupakan isu sentral lainnya. Fluktuasi harga yang tinggi dan kecenderungan harga yang lebih mahal daripada standar ritel nasional mengindikasikan bahwa mekanisme harga di Mersam tidak berjalan secara adil (*syi'r al-'adil*). Minimnya persaingan dan ketergantungan pada distributor lokal menciptakan potensi praktik *ghishshul-qiimah* (margin keuntungan yang tidak wajar) atau bahkan eksploitasi. Dalam perspektif *fiqh muamalah*, pasar yang ideal harus menjamin harga yang stabil, transparan, dan bebas dari unsur zalim. Kegagalan pasar untuk memenuhi prinsip keadilan distributif ini menunjukkan adanya kewajiban moral dan *siyasah* (kebijakan) bagi otoritas setempat untuk melakukan intervensi guna melindungi hak-hak ekonomi konsumen.

Hasil temuan ini memberikan landasan normatif dan akademis terhadap permasalahan di Mersam, serta secara penuh mengkonfirmasi tujuan penelitian. Konfirmasi tesis ini sejalan dengan temuan literatur bahwa ketiadaan ritel modern berkorelasi dengan ketidakstabilan harga, memvalidasi bahwa inefisiensi pasar adalah pemicu utama kesulitan belanja. Dengan demikian, penelitian ini berhasil menganalisis bentuk kesulitan belanja, menginterpretasikannya menggunakan teori *Mashlahah* dan *Al-Adl*, dan menegaskan bahwa intervensi pasar bukan sekadar masalah kebijakan ekonomi, tetapi merupakan kewajiban moral untuk mencapai *maqasid syariah* (tujuan syariat).

Sebagai solusi yang paling sesuai dengan prinsip Syariah, praktik terbaik yang diulas dalam literatur merekomendasikan penguatan kelembagaan lokal melalui model distribusi kolektif, seperti Koperasi Syariah atau BUMDes. Model ini menciptakan efisiensi rantai pasok, sehingga menurunkan harga untuk konsumen dan memenuhi aspek *mashlahah*. Pada saat yang sama, model ini memberdayakan pedagang lokal, mengimplementasikan etika pasar yang berorientasi pada kemaslahatan bersama dan keadilan. Meskipun demikian, perlu diakui bahwa analisis ini memiliki keterbatasan metodologis karena bersifat studi literatur, yang berarti temuannya normatif dan teoritis, dan tidak didukung oleh data primer dari lapangan, sehingga menghalangi kuantifikasi pasti tingkat fluktuasi harga dan kerugian *mashlahah*.

Tabel 1. Perbandingan Kondisi Pasar Riil di Kecamatan Mersam dengan Prinsip Distribusi Ekonomi Syariah

Aspek Distribusi Syariah	Kondisi Riil di Mersam (Tanpa Ritel Modern)	Prinsip Ideal Ekonomi Syariah	Analisis Kesenjangan
Ketersediaan Barang	Variasi minim, pasokan tidak stabil (tergantung	Pemenuhan *Dharuriyyat* (Primer) dan *Hajiyyat*	Kesenjangan Mashlahah (*Hajiyyat*) karena rendahnya

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

	distributor tunggal).	(Sekunder) masyarakat.	pilihan dan kenyamanan.
Keterjangkauan Harga	Fluktuasi harga tinggi, cenderung lebih mahal dari harga ritel nasional.	Harga adil (*syi'r al-'adil*), bebas dari eksploitasi (*ghishshul-qiimah*).	Kesenjangan Al-Adl (Keadilan Harga) dan potensi *ghishshul-qiimah*.
Efisiensi Rantai Pasok	Rantai distribusi panjang, biaya logistik tinggi, rentan *markup* berlapis.	Efisiensi, transparansi, dan larangan praktek yang merugikan.	Inefisiensi struktural menghambat pencapaian *mashlahah* dan keadilan.

. Secara normatif, temuan lapangan dan analisis komparatif ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara realitas pasar Mersam dan tujuan fundamental Ekonomi Syariah, khususnya dalam aspek Mashlahah (kesejahteraan). Keterbatasan variasi barang dan rendahnya aksesibilitas secara nyata mengurangi kualitas hidup dan kenyamanan belanja (*hajiyyat*) masyarakat, dan kesulitan ini paling memukul masyarakat berpenghasilan rendah karena keterbatasan mobilitas dan pengeluaran tambahan untuk biaya transportasi ke luar.

Penelitian ini telah berhasil mengkonfirmasi tujuan penelitian dengan menganalisis bentuk kesulitan belanja masyarakat Mersam, menginterpretasikannya menggunakan kerangka *Mashlahah* dan *Al-Adl*, dan menegaskan perlunya intervensi. Literatur ekonomi syariah menekankan perlunya mekanisme harga yang adil dan *supply chain* yang teratur; temuan di Mersam menunjukkan kurangnya sistem distribusi yang efisien dan adanya potensi praktik *ghishshul-qiimah* (margin tidak wajar) karena kurangnya kompetisi. Sebagai solusi yang sesuai dengan prinsip Syariah, direkomendasikan penguatan kelembagaan lokal melalui model distribusi kolektif, seperti Koperasi Syariah atau BUMDes, untuk menciptakan efisiensi harga bagi konsumen dan memberdayakan pedagang lokal. Meskipun demikian, perlu diakui bahwa analisis ini memiliki keterbatasan metodologis karena bersifat studi literatur, yang berarti temuannya normatif dan teoritis, dan tidak didukung oleh data primer dari lapangan, sehingga menghalangi kuantifikasi pasti tingkat fluktuasi harga dan kerugian *mashlahah* yang dialami masyarakat.

Temuan mengenai inefisiensi pasar, ketidakstabilan harga, dan minimnya akses barang di Mersam memiliki implikasi yang mendalam terhadap perumusan solusi berbasis Ekonomi Syariah. Karena ketiadaan ritel modern menghambat *equitable price formation* dan *distribution justice*, menjadi sangat penting untuk memperkuat pasar lokal berbasis syariah, seperti melalui pendirian Koperasi Syariah atau Toko Komunitas yang dikelola secara profesional. Pendekatan ini bertujuan untuk mengaktifkan kembali peran institusi ekonomi

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

komunitas sebagai penjamin *mashlahah* kolektif, alih-alih mengandalkan rantai pasok kapitalis murni. Model ini mengedepankan prinsip transparansi harga dan pengawasan pasar yang ketat untuk mencegah praktik *ghishshul-qiimah* (margin tidak wajar) dan memastikan setiap anggota masyarakat memperoleh harga yang adil (*syi'r al-'adil*). Solusi ini sejalan dengan *maqasid syariah* dalam memelihara harta (*hifz al-mal*) dan menjamin kesejahteraan umat.

Pemberdayaan pedagang kecil dan warung lokal dapat diangkat menjadi alternatif pengganti ritel modern yang sejalan dengan nilai-nilai Syariah. Daripada membiarkan pedagang kecil menjadi korban rantai pasok panjang, mereka dapat diintegrasikan ke dalam sistem distribusi kolektif yang dikelola BUMDes Syariah atau Koperasi. Hal ini memastikan bahwa efisiensi yang ditawarkan ritel modern dapat direplikasi, namun keuntungan tetap berputar di komunitas lokal, memenuhi aspek pemerataan. Selain itu, peran Pemerintah Daerah menjadi sangat krusial dalam penyediaan infrastruktur dan regulasi yang mendukung distribusi barang yang lebih merata. Intervensi pemerintah dapat diwujudkan dalam bentuk fasilitasi akses langsung ke distributor besar atau subsidi logistik, yang merupakan pelaksanaan tanggung jawab negara dalam menjamin *mashlahah 'ammah* (kemaslahatan umum) sesuai prinsip *fiqh siyasah*.

Meskipun temuan dan analisis normatif penelitian ini memberikan kerangka solusi yang kuat, perlu diakui adanya beberapa keterbatasan metodologis yang harus diperhitungkan. Penelitian ini menggunakan desain studi literatur dan observasi informal, sehingga data yang diperoleh bersifat kualitatif dan konseptual, tidak melibatkan analisis kuantitatif atau pengujian statistik. Hal ini berarti temuan yang disajikan bersifat deskriptif mengenai kondisi lapangan dan interpretasi normatif, namun tidak dapat mengkuantifikasi secara pasti tingkat fluktuasi harga atau persentase kerugian *mashlahah* yang dialami oleh populasi Mersam secara keseluruhan.

Lebih lanjut, keterbatasan ini mencakup potensi bias dari informan yang didasarkan pada pengalaman belanja yang berbeda-beda, serta keterbatasan waktu pengumpulan data informal yang mungkin mengurangi variasi kondisi lapangan yang terekam. Karena penelitian ini berlandaskan data sekunder dan temuan lapangan yang terbatas, rekomendasi solusi yang diberikan bersifat teoretis dan membutuhkan pengujian empiris lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian di masa depan disarankan untuk menggunakan metode *mixed-methods* yang mencakup survei kuantitatif dan wawancara mendalam untuk memvalidasi temuan normatif ini dengan data primer yang representatif.

KESIMPULAN

Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap kesulitan belanja di Kecamatan Mersam menegaskan bahwa ketiadaan gerai ritel modern menciptakan ketidakseimbangan struktural dalam pasar lokal yang signifikan. Kesimpulan pertama adalah adanya ketidakmampuan pasar untuk mencapai efisiensi optimal, yang termanifestasi dalam inefisiensi rantai distribusi, fluktuasi harga yang tinggi, dan variasi barang yang minim. Kondisi pasar yang tidak efisien ini menyebabkan kesenjangan *mashlahah* (kesejahteraan) masyarakat, di mana meskipun kebutuhan primer (*dharuriyyat*) masih dapat terpenuhi, kebutuhan sekunder (*hajiyyat*), yang

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

terkait dengan kenyamanan, pilihan, dan efisiensi waktu, terganggu secara serius. Gangguan terhadap dimensi *hajiyyat* ini secara kolektif mengurangi kualitas kesejahteraan hidup masyarakat setempat, yang merupakan tujuan utama dari setiap kegiatan ekonomi dalam kerangka Islam.

Secara normatif, kondisi pasar yang inefisien dan tidak terstruktur ini membawa pada kesimpulan kedua mengenai pelanggaran prinsip Keadilan Distributif (*Al-Adl*). Struktur pasar yang minim persaingan dan ketergantungan pada distributor lokal secara tidak langsung menciptakan potensi eksploitasi dan penetapan harga yang tidak adil. Ketidakstabilan harga dan kecenderungan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga ritel nasional mengindikasikan adanya praktik *ghishshul-qiimah* (margin keuntungan yang tidak wajar) yang bertentangan dengan konsep *syi'r al-'adil* (harga yang adil) dalam Ekonomi Syariah. Prinsip *Al-Adl* mewajibkan adanya keseimbangan dan keadilan; kegagalan pasar di Mersam untuk menjamin harga yang stabil dan wajar menunjukkan adanya kegagalan pasar yang berlandaskan moral dan etika Islam.

Secara keseluruhan, penelitian ini telah berhasil mengkonfirmasi tujuan awalnya dengan menganalisis bentuk-bentuk kesulitan belanja masyarakat Mersam melalui lensa teori Ekonomi Syariah. Konfirmasi ini mencakup penetapan bahwa inefisiensi pasar di Mersam bukan hanya masalah ekonomi murni, tetapi juga melanggar prinsip keadilan distributif dan kemaslahatan yang diamanatkan oleh *fiqh muamalah* dan *maqasid syariah*. Hasil kajian ini berhasil mengisi celah penelitian yang sebelumnya belum banyak mengkaji isu ketiadaan ritel modern dari perspektif normatif Syariah, sekaligus membuka ruang bagi perumusan solusi intervensi yang berakar pada nilai-nilai komunitas dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Aziz, A., & Hidayat, R. (2023). Penerapan Prinsip Keadilan (*Al-Adl*) dalam Mekanisme Pasar Islam dan Implikasinya terhadap Stabilitas Harga. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, *8*(1), 112-130.

Irawan, B., & Fitriyah, N. (2021). Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Inklusi Ekonomi dan Pemerataan Akses Ritel di Wilayah Perbatasan. *Jurnal Kebijakan Publik*, *12*(2), 45-60.

Kurniawan, A. S. (2022). Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Melalui BUMDes Syariah: Studi Kasus Distribusi Produk Lokal. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi*, *7*(4), 180-195.

Mustofa, M., & Huda, N. (2021). Analisis Peran Ritel Modern dalam Stabilitas Harga Komoditas Pangan Regional. *Jurnal Manajemen Ritel*, *6*(1), 35-48.

Purnomo, D., & Abdullah, F. (2022). Keterbatasan Infrastruktur Distribusi dan Dampaknya terhadap Kesenjangan Harga Barang di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, *6*(4), 210-225.

Rahman, A. (2024). Konsep *Hisbah* dan Aplikasinya sebagai Mekanisme Pengawasan Harga dan Kualitas Barang di Pasar Islam. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, *15*(1), 90-105.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Setiawan, B. (2022). Model Distribusi Berbasis Koperasi Syariah sebagai Solusi Mengatasi Kesenjangan Akses Pasar di Pedesaan. *Ekonomika Syariah: Jurnal Kajian Ilmiah*, *4*(3), 88-105.

Siregar, D. M., & Lubis, M. A. (2024). Analisis Konsep *Mashlahah* dalam Akses Barang Kebutuhan Pokok di Wilayah Terpencil. *Jurnal Studi Islam dan Ekonomi Syariah*, *10*(2), 55-70.

Suryadi, E. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Lokasi Ritel Waralaba dan Implikasinya terhadap Kesenjangan Distribusi. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Pembangunan*, *9*(3), 110-125.

Tarmizi, R. (2020). Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik *Ghishshul-Qiimah* (Harga Tidak Wajar) dalam Transaksi Distribusi Barang. *Jurnal Fiqh dan Usul Fiqh*, *18*(2), 65-80.

Umar, H., & Karim, A. (2023). Penerapan *Maqasid Syariah* dalam Kebijakan Pembangunan Ekonomi Lokal: Fokus pada Keadilan dan Pemerataan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, *7*(1), 15-30.

Zulfa, A., & Ghafar, M. A. (2023). Reorientasi Kajian Ekonomi Distribusi: Pendekatan Maqasid Syariah dalam Meninjau Akses Pasar di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *11*(3), 150-167.

Lisnaeni, L., Hakim Handoko, L., & Tarmizi Lubis, A. (n.d.). UNRAVELING ISLAMIC SOCIAL FINANCE ACCOUNTING RESEARCH: BIBLIOMETRIC ANALYSIS AND SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW (SLR). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, *10*(2), 205–232. https://doi.org/10.35836/jakis.v11i2.552